

**FRONTEX (EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY)
SECURITIZATION AGENDA IN GREECE ILLEGAL IMMIGRANTS
CRISIS**

**Author : Putri Lestari
lestariputri008@gmail.com**

Supervisor: Irwan Iskandar S.IP, MA

Bibliography: 13 Journals, 23 Books, 1 Thesis, 16 Documents, 25 Websites

Abstarct

Illegal immigrants are persons or groups entering a country without meeting the legal requirements to enter the country or without completing the necessary documents and permits. The entry of illegal immigrants in Greece left a negative impact on politics, socio-culture and security. Illegal immigrants travel very dangerous trip in order to realize their desires. Economic and security factors are the main reason people or groups travel far from their homes even beyond obstacles that are dangerous to their safety. Seeing the rampant flow of illegal immigrants, many pose a threat both in transit countries and in destination countries. Therefore, there needs to be an effort that can deal with the problem of illegal immigrants.

The method used by the authors in this study is the level of group behavior analysis. The level of group behavior analysis assumes that the main focus is on studying the behavior of groups and organizations involved in relationships. Data collection techniques in this study through literature study (library reaserch) and interview techniques (field study). The author uses it to obtain the necessary information by reading, understanding, comparing and analyzing books, scientific journals, articles and other data.

The arrival of illegal immigrants includes a new threat to the Greece society in this case the Greece Government is trying to do the handling by conducting securitization process in cooperation with FRONTEX (European Border And Coast Guard Agency),where FRONTEX make preventive and curative efforts. These efforts include supervision, maintenance and cooperation with other international organizations.

Keywords: *Illegal Immigrant, Greece, Securitization, Frontex*

Pendahuluan

Dalam dunia internasional imigran telah dikenal sejak dulu dimana imigran merupakan orang yang meninggalkan negara atau tempatnya baik secara individu maupun secara berkelompok. Ada banyak faktor sehingga sekelompok orang berpindah tempat. Bisa disebabkan karena bencana alam, kelaparan, maupun karena adanya rasa takut akibat perang yang mengancam keselamatan mereka dan tidak mendapat perlindungan dari negaranya sendiri.¹ Pada awalnya perpindahan penduduk hanyalah sebuah persoalan domestik suatu negara. Tetapi seiring dengan banyaknya negara yang menaruh perhatian terhadap persoalan ini sehingga kemudian menjadi persoalan bersama.

Pada umumnya, mereka ingin pindah ke wilayah dimana banyak terdapat masyarakat yang tentram dan damai, yaitu di negara-negara di Eropa. Namun, kenyataannya banyak negara Eropa yang tidak mau menerima imigran dari Timur Tengah dikarenakan krisis ekonomi yang melanda Eropa, membuat negara-negara Eropa tidak sanggup menampung dan merawat para imigran karena keterbatasan biaya. Setelah kemajuan perkembangan ekonomi Uni

Eropa yang mengarah ke kebijakan imigrasi Uni Eropa yang memperbolehkan perpindahan penduduk antar negara anggota Uni Eropa secara bebas, dan terbukanya kesempatan kerja di sektor informal menjadi daya tarik yang besar bagi imigran asal negara non-Uni Eropa untuk berpindah ke negara-negara di Kawasan Uni Eropa baik secara legal maupun illegal.²

Peningkatan imigrasi menuju Uni Eropa tersebut juga dialami oleh Negara Yunani yang telah bergabung menjadi anggota Uni Eropa (pada saat itu masih disebut Komunitas Ekonomi Eropa) sejak tahun 1981. Letak Yunani yang berada pada perbatasan selatan Area Schengen menyebabkan Yunani menerima jumlah imigran yang tinggi.³ Jumlah imigran di Yunani cenderung terus mengalami peningkatan sejak tren imigrasi tahun 1980-an. Data sensus tahun 2001 Badan Statistik Nasional Yunani (*National Statistical Service of Greece*) mencatat jumlah penduduk migran di Yunani sebanyak 762.191 orang.⁴ Kemudian, sebuah laporan dari *International Migration Outlook* dari *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 2010

¹Muhammad Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi, Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta : UI Press, 2004), hlm 14.

²IGst. Ngr. Gede Agung Pradipta, D. A. Wiwik Dharmiasih, Putu Titah Kawitri Resen. *Peningkatan Elektabilitas Partai Golden Dawn dalam Pemilu Perlemen Yunani Tahun 2012 melalui Agenda Politik Anti-Imigrasi*. Hal 30-31

³ Ibid. Hal.31

⁴Mediterranean Migration Observatory, *Statistical data on immigrants in Greece: An analytic study of available data and recommendations for conformity with European union standards*. 2004

memperkirakan angka imigran di Yunani berjumlah 1.259.258 orang.

Ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari jumlah penduduk migran yang ada di Yunani merupakan imigran yang tidak tercatat secara resmi atau ilegal. Angka sensus imigran yang tidak akurat tersebut menunjukkan bahwa imigrasi di Yunani sangatlah sulit untuk dikendalikan. Selain itu, tingginya jumlah imigran ilegal di Yunani juga dipengaruhi oleh kemudahan akses masuk menuju Yunani melalui jalur darat dan laut di perbatasan selatan yang sangat sulit untuk diawasi oleh Pemerintah Yunani. Segala cara dilakukan oleh pengungsi tersebut untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Uni Eropa.

Sejak terbentuknya FRONTEX (Badan Perbatasan Eropa) oleh Uni Eropa dalam menjaga serta mengontrol perbatasan dan merupakan badan khusus yang menangani masalah operasional perbatasan dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di laut yang bisa mengancam negara-negara Uni Eropa lainnya.⁵ Dari tugas dan tanggung jawab tersebut, Yunani bekerja sama dengan FRONTEX dalam menangani permasalahan imigran ilegal di perbatasan mereka.

FRONTEX adalah badan keamanan perbatasan Uni Eropa yang menjalankan operasi kerja sama di kawasan perbatasan luar Uni Eropa dan dibentuk Oktober tahun 2004.⁶ Dengan mengemban tugas sebagai pasukan cepat pada operasional perbatasan yang

dikirim khusus oleh Uni Eropa untuk dapat mencegah pertumbuhan terhadap arus para imigran yang masuk secara ilegal kedalam laut perbatasan Yunani..

Dari pernyataan diatas penulis merumuskan pertanyaan penelitian menjadi, “*Bagaimana upaya FRONTEX dalam menangani imigran ilegal di Yunani*”

Landasan Teoritis

Untuk menjelaskan “*Bagaimana upaya FRONTEX dalam menangani imigran ilegal di Yunani*” penulis menggunakan perspektif Copenhagen School dan teori Sekuritisasi

Perspektif School

Copenhagen

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif Copenhagen School yang dalam bukunya Barry Buzan berjudul *Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*.

Perubahan kajian keamanan tradisional menuju non-tradisional yang dipelopori oleh Barry Buzan, Ole Waever, serta beberapa pemikir disebut kelompok pemikir Copenhagen School. Mereka menyatakan bahwa eksistensi tipologi ancaman baru tersebut harus direspon dengan perubahan kerangka pemikiran Studi Keamanan yang beranjak dari batasan telaah Studi Keamanan Tradisional, dalam artian

⁵<http://frontex.europa.eu/about-frontex/mission-and-tasks>. Diakses pada tanggal 26 November 2016

⁶<http://frontex.europa.eu/about-frontex/origin/COUNCIL-REGULATION>

(EC) No 2007/2004 of 26 October 2004. *Establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union*. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

bahwa Studi Keamanan Non-Tradisional tidak beranggapan bahwa negara merupakan satu-satunya subyek keamanan.⁷ Terdapat beberapa pemikiran yang dihasilkan dari kelompok Copenhagen School ini seperti *regional security complex theory (RSCT)*, *European security*, serta hubungan antara keamanan regional dan global. Selain itu, salah satu pemikiran yang paling berkontribusi dan khas dari Copenhagen School adalah *Societal Security* (keamanan masyarakat) dan *Securitization* (Sekuritisasi). Posisi dari Copenhagen School berada antara keamanan tradisional yang cenderung *state-centrism* dan keamanan kritis yang memiliki fokus pada individu atau *global security*. Aliran keamanan yang dianut oleh Copenhagen School lebih kepada *societal security* atau keamanan masyarakat.

Teori Sekuritisasi

Untuk lebih masuk kedalam permasalahan imigran ilegal yang sudah menjadi ancaman baru ini penulis menggunakan Teori Sekuritisasi yang dipelopori oleh Barry Buzan, Ole Weaver dalam kerangka pemikiran mengenai *Security: A New Framework for Analysis*.

Sekuritisasi dipahami sebagai sebuah proses politik untuk menjadikan suatu masalah/isu yang sebelumnya

bukan masalah/isu militer menjadi masalah keamanan dengan melihat isu tersebut dari sudut pandang keamanan (*security*), sehingga isu tersebut dijadikan sebagai agenda nasional suatu negara (bahkan agenda global).

Teori sekuritisasi dalam kajian hubungan internasional tergolong konsep baru yang berkaitan dengan *power of idea* yang dipahami sebagai kemampuan untuk memproduksi ide dan menghasilkan sebuah discourse untuk mempengaruhi pihak lain. Selain unsur *power of idea*, unsure yang juga berperan dalam sekuritisasi adalah *speech act*, yaitu kemampuan melakukan sosialisasi ide untuk menentukan tipologi ancaman suatu negara. Dalam pandangan Buzan dan Weaver.

*“A speech act is interesting because it holds the insurrecting potential to break the ordinary, to establish meaning that is not already in the context. It reworks or produces a context by the performative success of the act.”*⁸

Keberhasilan suatu aktor dalam menunjukkan suatu isu menjadi sebuah ancaman bergantung pada keberhasilan aktor dalam mewacanakan keamanan. Pola tersebut merupakan konsep yang dikembangkan oleh Weaver yang dikenal dengan istilah Sekuritisasi. Sekuritisasi melihat bagaimana suatu isu ditafsirkan,

⁷Menurut Richard Ullman re-defenisi konsep keamanan tersebut berkisar pada tiga pertanyaan utama, yakni, *“Who is being secured? From what threats? How, and by what means?”*, Lihat : Ullman, Richard, (1983) *“Redefining Security”*, International Security Journal, vol. 8, dalam, Bedhera, Navnita Chadha, (2004) *“A South Asian Debate on Peace and Security: An Alternative*

Formulation in The Post –Cold War Era”, diakses dari http://www.afes-press.de/pdf/Hague/Chadha_Behera_South_Asian_debate.pdf, pada tanggal 29 Januari 2017

⁸Weaver, Ole. The UE as a Security Actors : Reflection from Pessimistic Constructivist On Post Sovereign Security Orders. Hal 286

dikonstruksikan, dan dipersepsikan sebagai suatu isu keamanan. Oleh karena itu, Buzan menjelaskan bahwa Sekuritisasi punya kaitan erat dengan politisasi karena pemaknaan sebuah isu menjadi isu keamanan adalah wewenang dari negara sebagai otoritas tertinggi. Sekuritisasi berbicara mengenai kebijakan publik.⁹ Jika keamanan dimaknai sebagai sebuah keberlangsungan (*survival*) dari ancaman eksistensial, maka sekuritisasi mengkonstruksi apa dan siapa yang menjadi ancaman eksistensial termasuk cara-cara menghadapinya.¹⁰

Merupakan produk *speech act* atau dalam istilah Weaver, “it is by labeling something a security that it becomes one”¹¹ oleh pelaku sekuritisasi atau biasa disebut actor sekuritisasi. Actor sekuritisasi dapat menyatakan sebuah obyek tertentu (*referent object*) dalam kondisi terancam sehingga dibutuhkan tindakan untuk menjamin kelangsungan hidup obyek tersebut. Kemudian isu tersebut berpindah dari isu biasa menjadi isu darurat yang harus segera ditangani secepatnya. Itu sebabnya *speech act* merupakan elemen terpenting dalam sekuritisasi sebuah isu.

Dalam kasus ini, *speech act* yang merupakan pernyataan dari masyarakat Yunani yang beranggapan bahwa imigran ilegal (*existential threat*) bertambah banyak akan mengancam kehidupan mereka. Dimana Pemerintah Yunani sebagai

securitizing actor membantu dalam penanganan masalah imigran ilegal ini dengan meminta bantuan *functional actors*. *Functional actors* adalah individu, IGO atau LSM yang concern terhadap permasalahan para imigran yang datang ke perbatasan seperti organisasi yang bertujuan menjaga keamanan perbatasan serta mengontrol darimana dan kemana arah para imigran tersebut. Salah satu organisasi pemerintah yang termasuk IGO adalah FRONTEX (Badan Perbatasan Eropa). FRONTEX merupakan sebuah organisasi internasional bentukan Uni Eropa yang menangani masalah perbatasan yang muncul akibat kedatangan para imigran yang masuk secara ilegal.

Upaya Preventif FRONTEX (Badan Perbatasan Eropa)

Pembentukan Joint Operational Poseidon Rapid Border Intervention Teams (RABIT)

Dalam mengatasi masalah imigrasi ilegal yang melewati perbatasan laut dan darat Uni Eropa, pada tahun 2007 dibentuk *Joint Poseidon* oleh Frontex yang dilaksanakan diperbatasan utama antara Yunani dan Turki (perbatasan darat dan laut), Yunani dan Albania (Perbatasan darat), Bulgaria dan Turki (Perbatasan darat), dan dipelabuhan-pelabuhan yang ada di Yunani dan Italia. Tujuan utama adalah untuk mengkoordinasi kerjasama operasional

⁹Buzan, Barry, Waever, Ole, Wilde, Jaap de. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers, Inc. hal 23

¹⁰Ibid. Hal.22

¹¹Weaver dalam Taureck, Rita. *Security Theory-the story so far : Theoretical Inheritance and what it means to be a post-structural realist*. Hal 3

antara anggota dalam bidang pengelolaan perbatasan luar Uni Eropa melalui organisasi patroli gabungan dan personil yang diberikan oleh negara anggota di wilayah yang telah ditentukan dan pemeriksaan perbatasan titik-titik penyebrangan (orang dan kendaraan).

Negara yang terlibat dalam operasi ini adalah Austria, Siprus, Perancis, Jerman, Latvia, Malta, Belanda, Portugal, Rumania, Spanyol dan Swedia. Perencanaan realisasi dari operasi ini berlangsung selama 5 bulan terhitung dari 15 Mei 2007 sampai 07 Oktober 2007 dengan budget 2.250.00,00 Euro. Operasi ini berlangsung di wilayah Laut Timur Mediterania. Pada tahun 2008 dilakukan perpanjangan dari operasi ini dan negara yang ikut tergabung adalah Denmark, Finlandia, Inggris, dan Italia. Dengan masa realisasi 7 bulan dimulai pada 05 Mei 2008 sampai dengan 15 Desember 2008.

Untuk mencegah penyebrangan secara ilegal yang semakin memuncak, melawan tindak kriminalitas lintas batas dan mengambil tindakan terhadap permasalahan ini maka FRONTEX yang telah disetujui oleh Direktur Eksekutif Gil Arias Fernandez melakukan perpanjangan operasi *Poseidon* ini sampai 5 tahun kedepan dengan melakukan pengawasan dan pengecekan perbatasan yang lebih baik lagi dan

melaksanakan kegiatan operasional yang terkoordinasi di perbatasan luar laut wilayah Mediterania Timur untuk mengendalikan arus migrasi yang tidak teratur menuju wilayah Negara-negara Anggota Uni Eropa dan untuk mengatasi kejahatan lintas batas.

Dalam operasi ini bersifat sukarela dimana negara anggota dapat mengirimkan bantuan operasional jika negara mereka tidak mengalami situasi tersebut. Dan sesuai dengan peraturannya *Frontex* diperbolehkan menggunakan *European Border Guard Teams* saat keadaan masalah migran ini mendesak dan dalam jangka waktu pendek. Jumlah penjaga perbatasan meningkat menjadi lebih banyak jika para negara anggota mengirimkan tambahan lebih banyak lagi yang sebelumnya 293 menjadi 400 dan dikerahkan secara bertahap di perbatasan luar Yunani dan menyebarkan 15 kapal kepulauan Yunani.

Frontex bekerjasama dengan NATO

FRONTEX dan NATO telah mencapai pemahaman bersama mengenai bentuk kerja sama mereka di Laut Aegea.¹² Sementara FRONTEX akan terus beroperasi di Laut Aegea dalam rangka operasi *Poseidon Rapid Intervention*, kedua organisasi tersebut

¹²Frontex and NATO To Cooperate In The Aegean Sea.
<http://frontex.europa.eu/news/frontex-and-nato-to-cooperate-in-the-aegean-sea>
nZMSYr. Diakses pada tanggal 15 juni 2017

akan bertukar informasi secara real time.

FRONTEX saat ini mengerahkan 14 kapal dan dua helikopter di Laut Aegea, yang mendukung pihak berwenang Yunani dalam pengawasan perbatasan, pendeteksian migran dan operasi pencarian dan penyelamatan. Secara total, FRONTEX memiliki 739 petugas, staf dan awak kapal di pulau-pulau Yunani untuk juga mendukung pendaftaran migran. Sejak awal 2016, lebih dari 130.000 migran tiba di pulau-pulau Yunani.

Direktur Eksekutif FRONTEX Fabrice Leggeri akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dan Komisaris Uni Eropa Dimitris Avramopoulos pada hari Senin di Brussels untuk membahas koordinasi kegiatan mereka terkait dengan krisis pengungsi dan migran. Pertemuan ini akan berlangsung setelah NATO memutuskan pada hari Kamis untuk memulai operasi di dekat Turki

FRONTEX dan NATO telah mencapai pemahaman bersama mengenai bentuk kerja sama mereka di Laut Aegea.

Upaya Kuratif *FRONTEX* (Badan Perbatasan Eropa)

Melakukan Operasi Triton dipusat Kepulauan Aegea

FRONTEX mengakhiri pembicaraan dengan pihak berwenang Italia pada 24 September mengenai peluncuran operasi gabungan baru di Italia. Karena tekanan migrasi yang sangat tinggi Italia saat ini tunduk, FRONTEX akan meluncurkan operasi baru di wilayah Mediterania Tengah. Kode nama Triton, operasi ini akan mencakup wilayah maritim di selatan Sisilia dan pulau-pulau Pelagic serta daerah pesisir sekitar Calabria, Italia selatan¹³

Setelah menetapkan persyaratan teknis, FRONTEX telah mengirim permintaan ke semua negara anggota Uni Eropa untuk menyumbangkan peralatan yang diperlukan - termasuk pesawat terbang dan berbagai kapal patroli - untuk mendukung pihak berwenang Italia dalam kegiatan kontrol perbatasan di Laut Tengah. Dan juga akan menghubungi Komisi Eropa dengan permintaan pendanaan operasi. Sementara menyelamatkan nyawa merupakan prioritas mutlak dalam semua operasi maritim yang dikoordinasikan oleh FRONTEX, fokus *Joint Operation Triton* akan terutama pengelolaan perbatasan.

¹³Frontex Launches For Participation Of The EU Member States in Joint Operation Triton. <http://frontex.europa.eu/search-results/?q=+Frontex+Launches+For+Participation+Of+The+EU+Member+States+in+Joint+Operation+Triton>. diakses pada tanggal 15 juni 2017

Direktur Eksekutif
FRONTEX Fabrice Leggeri
menandatangani rencana operasional
Operasi Gabungan Triton yang telah
diamandemen, memperluas wilayah
operasinya dan membawa sejumlah
ahli, kapal dan pesawat terbang
tambahan. Wilayah operasional akan
diperluas ke 138 NM selatan Sisilia.
Selama musim panas puncak, Triton
akan menggelar 3 pesawat terbang, 6
kapal patroli lepas pantai, 12 kapal
patroli, 2 helikopter, 9 timbangan jawab
dan 6 tim penyaringan.

Penerapan Konsep *Integrated Border Management* (IBM) di Kawasan Perbatasan

Untuk memfasilitasi
penerapan konsep *Integrated Border Management* (IBM) di perbatasan
eksternal Uni Eropa dengan mendirikan
Focal Points di hot spot di perbatasan
darat eksternal dan menggunakannya
sebagai platform untuk operasi
gabungan dan pengumpulan
informasi. Tuan rumah adalah Bulgaria,
Norwegia, Irlandia, Yunani,
Hungaria, Latvia, Polandia, Rumania
dan Slovakia. Dan negara yang ikut
berpartisipasi adalah Austria, Belgia,
Bulgaria, Kroasia, Perancis, Jerman,
Belanda, Bosnia, Moldova,
Serbia, Ukraina dan Swedia. Operasi ini
berpusat pada perbatasan darat yang
terletak di luar Uni Eropa¹⁴

Bekerja sama dengan negara-
negara di luar UE merupakan bagian

integral dari mandat Frontex. Tujuan
utamanya adalah untuk
mengintensifkan kerjasama bilateral
yang ada dengan negara-negara
tetangga UE, serta dengan negara-
negara asal dan transit untuk migrasi
tidak teratur. Seperti halnya kegiatan
Frontex lainnya, kerja sama eksternal
terutama didasarkan pada temuan
analisis risiko. Membangun hubungan
eksternal adalah alat yang berharga
untuk penanganan migrasi tidak resmi
dan kejahatan lintas batas secara efektif
sesuai dengan strategi *Integrated Border Management* (IBM) Uni
Eropa.¹⁵

Dalam konteks ini, Frontex
terus mengembangkan jaringan
kemitraan yang andal dengan otoritas
terkait negara-negara non-UE. Ini
biasanya adalah aparat penegak hukum
yang bertanggung jawab atas
pengendalian perbatasan.

Proyek ini berfokus pada
inisiatif pelatihan dan meningkatkan
kapasitas pelatihan sesuai dengan
kebutuhan spesifik penerima manfaat
proyek. Melalui program pelatihan
yang disesuaikan ini, Proyek
Pengembangan Kapasitas EaP-IBM
bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan badan-badan yang terlibat
dalam pengelolaan perbatasan untuk
memperbaiki keamanan, melindungi
orang-orang yang rentan (misalnya
pencari suaka, korban perdagangan
manusia), mencegah kejahatan lintas
batas, mengurangi Korupsi, dan
meningkatkan profesionalisme..

¹⁴Archive Of Operation, Joint Operational
Focal Point 2014 Extension.
[http://frontex.europa.eu/operations/archive-
of-operations/J4Fk7H?slug=joint-operation-](http://frontex.europa.eu/operations/archive-of-operations/J4Fk7H?slug=joint-operation-)

[focal-points-2014-extension](#). Diakses pada
tanggal 15 juni 2017

¹⁵Third Country.
[http://frontex.europa.eu/partners/third-
countries/](http://frontex.europa.eu/partners/third-countries/) diakses pada tanggal 15 juni 2017

Simpulan

Migrasi dan free movement merupakan salah satu konsekuensi yang tidak terelakan dari adanya proses globalisasi. Meski demikian, arus migrasi yang meningkat drastis dapat menjadi masalah serius bagi suatu wilayah, contohnya Uni Eropa. Tahun 2011 menandai fenomena masuknya gelombang imigran secara masif ke Uni Eropa yang diakibatkan oleh adanya peristiwa Arab Spring. Jumlah imigran yang masuk ke Uni Eropa pada tahun 2011 mencapai jumlah 70.000 orang, atau 7 kali lipat dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, meski pada tahun 2012 terdapat penurunan jumlah imigran, namun pada tahun 2013, lonjakan jumlah imigran kembali harus dihadapi oleh Uni Eropa. Situasi menjadi semakin serius tatkala jumlah imigran semakin meningkat setiap tahunnya. Tercatat 219.000 imigran memasuki wilayah Uni Eropa pada tahun 2014. Sementara pada tahun 2015, diperkirakan lebih dari satu juta imigran yang mencapai Uni Eropa melalui Mediterania. Dengan demikian, gelombang imigran ke Uni Eropa kali ini merupakan yang termasif sejak Perang Dunia ke-II, sehingga tak heran apabila sampai mendapat label krisis.

Proses sekuritisasi terhadap isu imigran di Yunani awalnya terjadi pada level nasional. Dengan mengatasnamakan identitas bangsa, aktor-aktor sekuritisasi yang berupa kepala pemerintahan maupun pihak oposisi di beberapa negara anggota Uni Eropa mengungkapkan krisis ini sebagai ancaman eksistensial. Pada penerapannya, proses sekuritisasi tersebut pun ternyata mendapat

dukungan dari audiens, sehingga langkah-langkah sekuritisasi pun lantas terlegalisasi pelaksanaannya.

Dalam hal ini, langkah sekuritisasi yang dilakukan oleh suatu negara anggota mendorong negara anggota lain untuk turut melakukan sekuritisasi pula. Dengan adanya ketergantungan keamanan pada negara-negara anggota Uni Eropa, maka sekuritisasi di tingkat nasional yang pada awalnya dianggap sebagai suatu ancaman eksistensial di sektor kebermasyarakatan memiliki efek echo untuk menjadi suatu ancaman sektor politik dan ekonomi pada level regional Yunani dan Uni Eropa. Hal ini kemudian mendorong adanya sekuritisasi terhadap isu imigran di Yunani pada regional Uni Eropa.

FRONTEX akan terus mendukung Yunani dalam pengawasan perbatasan, pencarian dan penyelamatan, pendaftaran dan identifikasi para migran, namun juga akan membantu pemerintah daerah dalam mengembalikan dan pembacaan kembali dari titik api.

Sementara kontrol perbatasan reguler adalah tanggung jawab eksklusif dari Negara-negara Anggota, peran Frontex berfokus pada koordinasi penyebaran ahli dan peralatan teknis tambahan ke daerah-daerah perbatasan yang mendapat tekanan signifikan. FRONTEX juga membangun kapasitas negara-negara anggota di berbagai bidang yang terkait dengan kontrol perbatasan, termasuk pelatihan dan sharing praktik terbaik. Operasi bersama FRONTEX direncanakan dan dikembangkan berdasarkan Laporan

Analisis Risiko Tahunan yang menganalisis kemungkinan risiko migrasi tidak resmi dan kejahatan lintas batas di sepanjang perbatasan eksternal Uni Eropa.

Selama pertemuan tahunan dengan Negara-negara Anggota, agensi tersebut kemudian memprioritaskan operasi bersama yang diusulkan berdasarkan kepentingan dan sumber daya yang ada untuk memastikan tanggapan yang efektif. Bersama negara tuan rumah FRONTEX membuat penilaian terhadap jumlah petugas dengan keahlian khusus dan jumlah dan jenis peralatan teknis yang dibutuhkan.

FRONTEX kemudian mengarahkan permintaan ke semua Negara Anggota dan *Schengen Associated Countries* untuk petugas yang diperlukan, dengan jelas menentukan profil yang dipersyaratkan mereka (ahli dokumen palsu, cek perbatasan, pakar surveilans, penanganan anjing, pembatalan dll) serta peralatan khusus yang diperlukan untuk operasi tersebut Misalnya helikopter, pesawat terbang, mobil patroli, peralatan thermo-vision, detektor detektor jantung). Negara-negara tersebut kemudian memutuskan tingkat kontribusi yang dapat mereka ambil untuk operasi bersama.

Dengan adanya bantuan operasional perbatasan yang dibentuk oleh Uni Eropa ini membuat Yunani bisa benapas lega karna dengan adanya operasi-operasi yang dibentuk menandakan bahwa permasalahan imigran ilegal ini bisa secara bertahap dapat dikurangi. Hanya butuh konsisten dan komitmen yang kuat dalam menjalani dan menghadapi permasalahan ini.

Daftar Pustaka

Jurnal:

Dewitt, David. *Common, Comprehensive and Cooperative Security*. Journal The Pacific review Vol 7 No.1 Tahun 1994.

Donald E. Nucterlain. *National Interest A New Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979

Jurnal Perempuan. 2010. “*Trafficking Dan Kebijakan*”. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Vol.3. Nomor 3.

Grossman, J. B. 1984. *Illegal Immigrants and Domestic Employment*. Industrial and Labor Relation Review. Vol. 37, No. 2

Guterres, Antonio. 2011. *The Legal Framework for Protecting Refugees*

Heckmann, Friedrich. 2004. *Illegal Migration: What Can We Know and What Can We Explain? The Case of Germany*. International Migration Review, Vol. 38, No. 3

Maran, Rita. 2000. *Perspektives on International Human Rights Law and Traditionalism*. Jurnal GLOBAL. Vol.1, No.6.

- Mangandar Situmprang, 2010, *"Hubungan Internasional"*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol.5 No.2, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan
- Olivia, Yessi. 2012. *Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Transnasional. Vol.3
- Olii, Mohammad Irvan, 2005, *"Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan?" Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnasional Crime*", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.4 No.1
- Rita, Taureek. *Securitization Theory- The Story so far : Theoretical inheritance and what it means to be a post-structural realist*. Paper for presentation at the 4 annual CEEISA convention University of Tartu, 25-27 June 2006
- Saeri, M. 2012. *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Transnasional. Vol.3, No.2.
- Working Group. 2009. *Situation Report on International Migration in East and South East Asia, Regional Thematic*. International Migration including Human Trafficking. Vol 3 No.2. 2009
- Buku:**
- Archer, Clive. 1993. *International Organization*. London: University of Aberdeen
- Asrudin, Mirza Jaka Suryana dkk. 2009. *Refleksi teori hubungan internasional (dari tradisional ke kontemporer)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Burchill, Scott & Andrew Linklater. 2015. *Teori-teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media
- Bandoro, Bantarto. 1992. *Masalah Keamanan Internasional, Model center periphery*. Jakarta. CSIS.
- Bennet, A. Le Roy. 1995. *International Organization*, London: George Allen and Unwin Publisher Company
- Bello, Jose-Miguel Y. Villarino, dan Ramona Viyeyarasa. "The Obligation of the EU to Protect European Citizens Broad from Execution: The International Implications of the European Consensus Against the Death Penalty". Jurnal Kajian Wilayah Eropa. Vol 4 No. 2 Tahun 2008. Jakarta: Program Studi Kajian Wilayah Eropa Universitas Indonesia;

- Burchill, Scott, & Linklater, Andrew. 1996. *Teori-Teori Hubungan Internasional*, New York: ST Martin's Press
- Buzan, Barry and Lene Hansen. 2000. *The Evolution Of International Security Studies*. New York: Palgrave.
- Buzan, Barry. 2001. *States & Fear an Agenda For International Security Studies in The Post-Cold War Area 2nd*. New York.
- Buzan, Weaver, Wilde. 2000. *Securitization A New Framework For Analysis*. New York.
- Craig A. Snyder, 1999. *Contemporary Security and Strategy* (London : Deakin University)
- Dougherty, James E. dan Plahxgraff, Robert L. Jr. 1995. *Teori-teori hubungan Internasional*, terjemahan M. Amin Rais, Harwanto Dahlan, Tulus Warsito, Yogyakarta, Fisipol-UMY, 1995.
- Hanson, Gordon H., (2007): *The Economic Logic of Illegal Migration*. Council Special Reports (CSR) No. 26, April. USA: Council on Foreign Relations.
- International Organization for Migration Data and Research on Human Trafficking 2005. *People trafficking : upholding right and understanding vulnerabilities, Forced Migration Review*, University of Oxford.
- IOM (International Organization for Migration) , 2009, *Buku Panduan Bagi Petugas*. Jakarta : IOM.
- Jackson, Robert and Sorensen, Georg. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, terj. Dadan Suryadipura, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jill, Steans & Pettiford, Lloyd. 2009. *Hubungan Internasional : Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lexi J Moleong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya : Bandung
- Mohtar Mas'oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES
- Perwita A.A dan Y. M. Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sukma, Rizal. 2006. *The Securitization Of Human Trafficking In*

Indonesia. Jakarta.
Gramedia

Under Art. 33 Of The
FRONTEX Regulation 2015

Winarno, Budi. 2014. *Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)

Weber, Cynthia. 2010. *International Relation Theory: A Critical Introduction*. London and New York: Routledge

COUNCIL REGULATION (EC) No 2007/2004 of 26 October 2004 Establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union.

REGULATION (EU) No 1168/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011 Amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 Establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union.

Dokumen :

FRONTEX General Report 2010

FRONTEX Court Of Audit Report 2010

FRONTEX Grants Awarded 2010

FRONTEX Ethics Of Border Security Report 2010

FRONTEX Final Report 2011

FRONTEX Grants Awarded 2011

FRONTEX General Report 2014

FRONTEX General Report EN

FRONTEX Annual Report On Sea Surveillance 2015

FRONTEX Annual Risk Analysis 2010

FRONTEX Code Of Conduct 2013

FRONTEX FRAN Quarterly 2015

FRONTEX Final Report External Evaluation Of The Agency

UNHCR, UNHCR Global Appeal 2015 update 2015. *Financial Information*. *Jurnal Hukum, UNHCR, Submission by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in the Case of Hirsi and Others v. Italy* (Application no. 27765/09).

Skripsi :

Maulana, Ilham. 2016. *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Imigran Ilegal Yang Menuju Australia*

Tahun 2012-2015. Skripsi
Ilmu Hubungan
Internasional FISIP
Universitas Riau.
Pekanbaru

Website:

“Archive Of Operation, Joint
Operational Focal Point
2014 Extension”.
<http://frontex.europa.eu/operations/archive-of-operations/J4Fk7H?slug=joint-operation-focal-points-2014-extension>.
Diakses pada tanggal 15
juni 2017 pukul 22.36
WIB

“European Fair Trade Association”.
<http://www.european-fair-tradeassociation.org/efta/> .
22Juli 2017.

“Euro Zone Crisis”.
http://finmin.nic.in/WorkingPaper/euro_zone_crisis.pdf
f . 23 Juli 2017.

“Eurozone Finance Ministers Agree
Deal on Greece Bailout”.
<http://www.bbc.com/news/business-20506251> . 22 Juli
2017 pukul 15.37 WIB

“Frontex and NATO To Cooperate In
The Aegean Sea”.
<http://frontex.europa.eu/news/frontex-and-nato-to-cooperate-in-the-aegean-sea-nZMSYr>. Diakses
pada tanggal 15 juni 2017
pukul 22.09 WIB

“Frontex Launches For Participation
Of The EU Member
States in Joint Operation
Triton”
[.http://frontex.europa.eu/search-results/?q=+Frontex+Launches+For+Participation+Of+The+EU+Member+States+in+Joint+Operation+Triton](http://frontex.europa.eu/search-results/?q=+Frontex+Launches+For+Participation+Of+The+EU+Member+States+in+Joint+Operation+Triton). diakses pada
tanggal 15 juni 2017
pukul 22.14 WIB

“Negara-Negara Anggota Uni Eropa”.
<http://ilmupengetahuanumum.com/negara-anggota-unieropaeuropean-union/> . 17
Maret 2017

“Third Country”.
<http://frontex.europa.eu/partners/third-countries/>
diakses pada tanggal 15
juni 2017 puku; 23.12 WIB

<http://frontex.europa.eu> diakses pada
tanggal 27 September 2016
pukul 14.25 WIB

<http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/MPC-RR-2013-009.pdf> diakses pada
tanggal 27 September 2016
pukul 14.27 WIB

<http://www.imigrasi.go.id/> diakses pada 28 September 2016 pukul 14.29 WIB

<http://www.icj-cij.org/search/index.php?pg=1&p2=2&op=0&str=aegea+sea> diakses pada tanggal 28 September 2016 pukul 11.31 WIB

<http://www1.american.edu/ted/ice/aegean.htm> diakses pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 10.45 WIB

http://europa.eu/abouteu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/frontex/index_en.htm diakses pada tanggal 13 November 2016 pukul 13.40 WIB

<http://www.dw.com/id/frontex-dan-kerjasama-keamanan-uni-eropa/a-2972116> diakses pada tanggal 13 Desember 2016 pukul 12.00 WIB

<http://frontex.europa.eu/about-frontex/origin/> diakses pada 27 Maret 2017 pukul 09.45 WIB

<https://manshurzikri.wordpress.com/2011/01/05/permasalahan-imigran-gelap-dan-people-smuggling-dan-usaha-usaha-serta-rekomendasi-kebijakan-dalam-menanggulangnya/> diakses pada tanggal 08 Mei 2017 pukul 12.13 WIB

<http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/perdagangan-orang> diakses pada tanggal 22 Juni 2017 pukul 14.25 WIB

<http://frontex.europa.eu/news/frontex-and-nato-to-cooperate-in-the-aegean-sea-nZMSYr> diakses pada tanggal 05 Agustus 2017 pukul 10.33 WIB

www.basarnas.go.id/index.php/baca/artikel/2027/sisi-pelik-imigran-gelap diakses pada tanggal 11 Agustus 2017 pukul 22.13 WIB

www.sindonews.com/read/2011/12/22/447/545964/ada-mafia-dalam-penyelundupan-imigran-gelap diakses pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 15.00 WIB